Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN : 3046-8132; dan p-ISSN : 3046-868X; Hal. 75-90
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v3i4.2760
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM pada BRI Cabang Tiakur

Analysis of the Disbursement of People's Business Credit (KUR) for MSMEs at the BRI Tiakur Branch

Janet Wilsye Litualy
Program Studi Akuntansi, PSDKU Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura, Indonesia
Penulis Korespondensi: janet.litualy@lecturer.unpatti.ac.id

Abstract. *This study examines the distribution of People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat or KUR) to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) at BRI Tiakur Branch during the 2023–2025 period. The study is motivated by fluctuations in credit realization, changes in the number of debtors, and variations in the nominal value of non-performing loans. It aims to describe the development of KUR distribution, identify potential obstacles in the lending process, and examine factors that may be associated with the gap between distribution targets and actual realization. This research employs a qualitative approach using a case study method. The analysis is based on quarterly KUR distribution data. The available data indicate that total recorded KUR realization decreased from IDR 5.70 billion in 2023 to IDR 3.96 billion in 2024 and IDR 3.33 billion in 2025. The recorded interest rate remained at 6% throughout the observation period, while the nominal value of non-performing loans fluctuated. These findings indicate that KUR distribution at BRI Tiakur Branch requires further examination beyond interest rates, particularly regarding borrower eligibility, administrative requirements, business financing needs, credit assessment procedures, and credit risk management. The study is expected to provide contextual insights into the implementation of KUR distribution and support the development of strategies to improve lending effectiveness, expand MSME access to financing, and maintain credit quality.*

Keywords: *Case Studies; Loan Disbursement; Microenterprise Loans; MSME Financing; Non-Performing Loans.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM di BRI Cabang Tiakur selama periode 2023–2025, mengidentifikasi kendala dalam proses penyaluran, serta mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan kesenjangan antara target dan realisasi penyaluran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan realisasi penyaluran kredit, jumlah debitur, dan nominal kredit bermasalah selama periode pengamatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis dilakukan berdasarkan data penyaluran KUR per triwulan, Data yang tersedia menunjukkan bahwa total realisasi penyaluran KUR berdasarkan penjumlahan angka triwulanan menurun dari Rp5,70 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp3,96 miliar pada tahun 2024 dan Rp3,33 miliar pada tahun 2025. Suku bunga yang tercatat tetap sebesar 6% selama periode penelitian, sedangkan nominal kredit bermasalah mengalami fluktuasi. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penyaluran KUR perlu dikaji tidak hanya berdasarkan suku bunga, tetapi juga melalui aspek kelayakan calon debitur, kelengkapan administrasi, kebutuhan pembiayaan UMKM, proses penilaian kredit, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai pelaksanaan penyaluran KUR serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, dan menjaga kualitas kredit.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah; Kredit Usaha Rakyat; Pembiayaan UMKM; Penyaluran Kredit; Studi Kasus.

1. LATAR BELAKANG

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran kredit menjadi salah satu kegiatan utama bank, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha,

Naskah Masuk: 02 September 2026; Revisi: 07 Oktober 2026; Diterima: 04 November 2026; Terbit: 14 November 2026

kemampuan membayar, dan risiko agar fungsi intermediasi dapat berjalan secara berkelanjutan (Gurley & Shaw, 1960; Diamond, 1984; Kasmir, 2023).

Salah satu kelompok usaha yang membutuhkan akses pembiayaan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM berperan dalam kegiatan produksi, perdagangan, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat, tetapi sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan modal serta akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, ketersediaan kredit yang sesuai kebutuhan usaha menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Tambunan, 2020; Tukan et al., 2023).

Pemerintah mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema pembiayaan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kredit produktif. Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR melibatkan lembaga penyalur dan calon debitur yang perlu memenuhi persyaratan serta proses penilaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pelaksanaan KUR tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga perlu dipahami melalui proses, capaian, kualitas kredit, dan kendala yang terjadi di lapangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Saba et al., 2025).

Penyaluran kredit merupakan keputusan yang mempertimbangkan berbagai unsur, termasuk kebutuhan pembiayaan calon debitur, biaya kredit, kemampuan usaha menghasilkan arus kas, serta kebijakan kehati-hatian bank (Solehah et al., 2025). Suku bunga dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi calon debitur karena berkaitan dengan biaya pinjaman, sedangkan bagi bank keputusan penyaluran tetap memerlukan penilaian kelayakan dan risiko. Dengan demikian, kondisi suku bunga perlu dipahami sebagai bagian dari konteks penyaluran, bukan sebagai satu-satunya penentu realisasi kredit (Kasmir, 2023; Ismail, 2018).

Kondisi perekonomian daerah juga dapat membentuk kebutuhan modal dan kemampuan pelaku UMKM menjalankan usaha. Ketika aktivitas ekonomi berkembang, sebagian usaha mungkin membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi; sebaliknya, keterbatasan pasar, biaya distribusi, dan ketidakpastian pendapatan dapat memengaruhi kebutuhan serta kemampuan mengakses kredit. Hubungan tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan pengalaman pelaku usaha, bukan hanya berdasarkan indikator ekonomi agregat (Todaro & Smith, 2021; Sukirno, 2019).

Di sisi bank, kualitas kredit menjadi perhatian karena kredit bermasalah dapat meningkatkan risiko kerugian dan mendorong penyalur menerapkan penilaian yang lebih selektif. Rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) secara umum digunakan

untuk menggambarkan kualitas aset kredit, tetapi nominal kredit bermasalah tidak dapat langsung disamakan dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tanpa pembanding total kredit yang relevan (Bahri & Riyadi, 2026) . Oleh karena itu, data kredit bermasalah pada BRI Cabang Tiakur perlu ditelaah secara hati-hati dan dikonfirmasi melalui dokumen pendukung serta keterangan informan yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Bank Rakyat Indonesia, 2025).

Aspek permodalan juga berhubungan dengan kemampuan bank menyerap risiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan bank yang memperhitungkan modal yang memenuhi ketentuan terhadap aset tertimbang menurut risiko. Namun, CAR lazimnya dipublikasikan pada tingkat bank, sehingga angka CAR BRI secara keseluruhan tidak otomatis menggambarkan kondisi permodalan khusus kantor cabang. Dalam penelitian ini, CAR ditempatkan sebagai konteks pendukung apabila tersedia sumber resmi yang relevan, bukan sebagai angka yang diasumsikan mewakili BRI Cabang Tiakur (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Bank Rakyat Indonesia, 2025).

BRI Cabang Tiakur di Pulau Moa beroperasi dalam konteks Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki karakteristik kepulauan. Dalam konteks seperti ini, jarak antarpulau, akses transportasi, skala pasar, jenis usaha, dan ketersediaan informasi dapat menjadi kondisi yang relevan untuk dipahami ketika menelaah proses penyaluran pembiayaan. Penelitian ini akan mengidentifikasi perkembangan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran kredit, jumlah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan volume penyaluran kredit selama periode penelitian. Data tersebut akan digunakan untuk melihat apakah volume penyaluran kredit menunjukkan tren peningkatan yang sejalan dengan kebijakan suku bunga kredit dan perkembangan perekonomian daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan menjelaskan peran lembaga keuangan dalam mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank menjalankan fungsi ini melalui penghimpunan dana, penilaian peminjam, pengelolaan risiko, dan penyaluran kredit. Fungsi intermediasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah kredit, tetapi juga dengan kualitas proses penyaluran dan keberlanjutan pengelolaan risiko (Gurley & Shaw, 1960; Diamond, 1984; Akmal et al., 2025).

Diamond (1984) menjelaskan pentingnya pemantauan yang didelegasikan oleh lembaga keuangan untuk mengurangi masalah informasi antara pemberi pinjaman dan

peminjam. Dalam konteks KUR, bank perlu menilai kelayakan usaha, kemampuan membayar, tujuan penggunaan dana, serta informasi lain yang relevan sebelum dan setelah kredit diberikan. Oleh sebab itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan kebijakan, prosedur, interaksi petugas dengan calon debitur, dan pengelolaan risiko (Diamond, 1984; Ismail, 2018). Dalam penelitian ini, teori intermediasi keuangan digunakan sebagai lensa untuk membaca perkembangan realisasi KUR, penanganan kredit bermasalah, dan kendala penyaluran. (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami perkembangan penyaluran KUR, penanganan kredit bermasalah, dan kendala pelaksanaan berdasarkan konteks dan pengalaman pihak yang terlibat (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan pada BRI Cabang Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan, data sekunder berupa dokumen penyaluran KUR, laporan yang diberikan secara sah oleh pihak bank pada saat pengambilan data pada BRI Cabang Tiakur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini membahas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada BRI Cabang Tiakur. Analisis dilakukan dengan menggunakan data target dan realisasi penyaluran KUR, tingkat suku bunga, jumlah debitur, total kredit bermasalah, serta rasio kecukupan modal setiap triwulan. Data yang tersedia diperoleh dari Bank BRI Cabang Tiakur mencakup tahun 2023-2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penyaluran KUR Tahun 2023.

No.	Item	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Target penyaluran KUR (Rp)	7.415.731.895	15.220.905.214	22.468.566.153	29.716.227.093
2	Realisasi penyaluran KUR (Rp)	725.000.000	2.129.100.000	1.325.000.000	1.521.200.000
3	Tingkat suku bunga KUR	6%	6%	6%	6%
4	Jumlah debitur KUR (orang)	14	52	33	44
5	Total kredit bermasalah (Rp)	70.880.343	–	22.264.415	154.230.836
6	Rasio kecukupan modal	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bank BRI Cabang Tiakur, 2026

Tabel 2. Data Penyaluran KUR Tahun 2024.

No.	Item	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Target penyaluran KUR (Rp)	10.984.160.179	22.662.235.643	34.340.311.108	34.340.311.108
2	Realisasi penyaluran KUR (Rp)	1.236.100.000	1.420.300.000	1.032.100.000	275.200.000
3	Tingkat suku bunga KUR	6%	6%	6%	6%
4	Jumlah debitur KUR (orang)	30	38	29	8
5	Total kredit bermasalah (Rp)	440.297.443	704.448.583	31.827.901	175.259.619
6	Rasio kecukupan modal	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bank BRI Cabang Tiakur, 2026

Tabel 3. Data Penyaluran KUR Tahun 2025.

No.	Item	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Target penyaluran KUR (Rp)	2.117.477.572	4.653.727.315	7.161.388.146	9.632.189.392
2	Realisasi penyaluran KUR (Rp)	634.100.000	545.000.000	1.170.000.000	977.500.000
3	Tingkat suku bunga KUR	6%	6%	6%	6%
4	Jumlah debitur KUR (orang)	23	21	23	33
5	Total kredit bermasalah (Rp)	7.480.767	34.100.000	138.435.468	2.196.948
6	Rasio kecukupan modal	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bank BRI Cabang Tiakur, 2026

Berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 3, perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Cabang Tiakur selama tahun 2023–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, baik dari sisi realisasi penyaluran, jumlah debitur, maupun kredit bermasalah. Realisasi penyaluran pada tahun 2023 berjumlah Rp5.700.300.000, tahun 2024 sebesar Rp3.963.700.000, dan tahun 2025 sebesar Rp3.326.600.000 berdasarkan penjumlahan angka triwulanan yang tercantum. Jumlah debitur juga mengalami perubahan, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 52 orang pada triwulan II, tahun 2024 sebanyak 38 orang pada triwulan II, dan tahun 2025 sebanyak 33 orang pada triwulan IV.

Sementara itu, suku bunga KUR tercatat tetap sebesar 6% selama periode penelitian, tetapi realisasi penyaluran tetap mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penyaluran KUR tidak hanya berkaitan dengan suku bunga, tetapi juga dapat dipahami melalui teori intermediasi keuangan, yang menjelaskan peran bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan risiko kredit (Gurley & Shaw, 1960; Diamond, 1984). Dari sisi kredit bermasalah, nilai nominal yang tercatat juga berfluktuasi. Pada tahun 2023, nilai tertinggi terjadi pada triwulan IV sebesar Rp154.230.836; pada tahun 2024, nilai tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar Rp704.448.583; sedangkan pada tahun 2025, nilai tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar Rp138.435.468. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan risiko dan pemantauan pembayaran debitur dalam menjaga kualitas penyaluran KUR. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dibahas dalam proposal,

seperti Ramandhana et al. (2018) dan Arin (2022), yang mengkaji keterkaitan risiko kredit dan indikator perbankan dengan penyaluran kredit.

Berdasarkan data hasil penelitian maka berikut merupakan analisis masalah yang dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Cabang Tiakur baik dari sisi bank maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelayakan calon debitur menjadi bagian penting dalam proses penyaluran KUR karena bank perlu memastikan bahwa calon penerima memiliki usaha yang layak dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penilaian tersebut berkaitan dengan kondisi usaha, pendapatan, arus kas, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan membayar angsuran. Calon debitur yang belum dapat menunjukkan informasi memadai mengenai kondisi usahanya mungkin memerlukan pemeriksaan atau kelengkapan tambahan sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut. Hal ini dapat memengaruhi jumlah permohonan yang berhasil memperoleh persetujuan dan akhirnya direalisasikan.

Kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan kredit juga perlu diperhatikan karena tidak semua pelaku usaha memiliki kesiapan administrasi dan pencatatan keuangan yang sama. UMKM yang belum melakukan pencatatan transaksi secara teratur dapat mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan pendapatan, pengeluaran, arus kas, dan kebutuhan modal usahanya. Informasi tersebut diperlukan untuk membantu bank memahami kondisi usaha dan menilai kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran. Selain kelengkapan dokumen, pemahaman mengenai prosedur pengajuan juga dapat memengaruhi kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Oleh karena itu, penelusuran terhadap persyaratan yang paling sering menjadi kendala, dokumen yang perlu dilengkapi, serta bentuk informasi atau pendampingan yang diberikan oleh pihak bank dapat membantu menjelaskan hambatan yang muncul selama proses penyaluran KUR.

Selain berkaitan dengan persyaratan dan kelayakan calon debitur, penyaluran KUR juga perlu dianalisis berdasarkan perkembangan kredit bermasalah. Data penelitian menunjukkan bahwa nominal kredit bermasalah mengalami perubahan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, nominal tertinggi yang tercatat berada pada triwulan IV sebesar Rp154.230.836. Pada tahun 2024, nominal tertinggi tercatat pada triwulan II sebesar Rp704.448.583, sedangkan pada tahun 2025 nominal tertinggi tercatat pada triwulan III sebesar Rp138.435.468. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa nominal kredit bermasalah berfluktuasi selama periode pengamatan. Kondisi ini menjadikan pemantauan pembayaran dan perkembangan usaha debitur sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyaluran KUR. Bank perlu mengetahui kemampuan pembayaran debitur serta melakukan

tindak lanjut apabila terjadi keterlambatan atau kesulitan pembayaran. Meskipun demikian, nominal kredit bermasalah tersebut belum dapat membuktikan bahwa risiko kredit merupakan penyebab rendahnya realisasi penyaluran, sehingga perlu diketahui bagaimana kondisi kredit bermasalah dipertimbangkan dalam proses analisis dan persetujuan kredit.

Kondisi ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan dalam memahami kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kerja BRI Cabang Tiakur. Pelaku usaha dapat membutuhkan tambahan modal untuk membeli persediaan, memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan produksi, atau mengembangkan usahanya. Namun, keputusan untuk mengajukan pinjaman juga berkaitan dengan perkiraan pendapatan dan kemampuan membayar angsuran. Ketika pelaku usaha belum membutuhkan tambahan modal atau merasa pendapatannya belum cukup stabil untuk menanggung kewajiban kredit, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mungkin tidak menjadi pilihan utama. Sebaliknya, kebutuhan modal yang meningkat dapat mendorong pelaku usaha mempertimbangkan pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, perubahan realisasi penyaluran perlu dipahami dengan melihat kebutuhan modal, perkembangan omzet, kondisi kegiatan usaha, serta alasan pelaku UMKM mengajukan atau tidak mengajukan KUR. Informasi tersebut dapat membantu menjelaskan apakah realisasi penyaluran berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat atau terdapat kendala lain dalam proses pengajuan.

Proses dan kebijakan internal bank juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena penyaluran KUR melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan dokumen, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, hingga pemantauan pembayaran. Setiap tahapan memerlukan informasi yang memadai agar kredit dapat disalurkan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan. Apabila dokumen belum lengkap atau masih diperlukan pemeriksaan tambahan, proses pengajuan dapat membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, pelaksanaan analisis dan pemantauan kredit tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian, kelancaran penyaluran KUR perlu dilihat dari keseimbangan antara proses pelayanan kepada calon debitur dan pelaksanaan penilaian risiko. Penjelasan mengenai prosedur yang diterapkan, tahapan yang paling sering mengalami hambatan, serta upaya bank dalam mempercepat proses pelayanan tanpa mengabaikan persyaratan kredit dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan penyaluran KUR di BRI Cabang Tiakur.

Pembahasan

Penyaluran KUR UMKM di BRI Cabang Tiakur

Berdasarkan data tahun 2023–2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Cabang Tiakur menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Jumlah realisasi berdasarkan penjumlahan angka pada tabel mencapai Rp5.700.300.000 pada tahun 2023, Rp3.963.700.000 pada tahun 2024, dan Rp3.326.600.000 pada tahun 2025. Pola tersebut memperlihatkan bahwa nominal penyaluran yang tercatat mengalami penurunan selama periode pengamatan. Sementara itu, jumlah debitur juga mengalami perubahan, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 52 debitur pada triwulan II, tahun 2024 sebanyak 38 debitur pada triwulan II, dan tahun 2025 sebanyak 33 debitur pada triwulan IV.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan yang memandang bank sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Gurley & Shaw (1960) menjelaskan peran lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada sektor ekonomi, sedangkan Diamond (1984) menekankan pentingnya pemantauan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi masalah informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam konteks penelitian ini, penyaluran KUR bukan hanya berkaitan dengan besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dengan kemampuan bank menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak menerima pembiayaan serta mengelola risiko kredit secara berkelanjutan.

Fluktuasi realisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi tidak selalu menghasilkan peningkatan penyaluran dari tahun ke tahun. Penyaluran kredit bergantung pada kebutuhan pembiayaan, kelayakan calon debitur, kemampuan membayar, dan proses penilaian kredit. Dengan demikian, penurunan realisasi yang tercatat dapat dipahami sebagai kondisi yang perlu dianalisis dalam konteks proses penyaluran KUR, bukan semata-mata sebagai indikasi bahwa fungsi bank tidak berjalan dengan baik.

Hasil ini juga sejalan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam proposal, yaitu Ramandhana et al. (2018), Permana & Dillak (2019), serta Arin (2022), yang mengkaji hubungan berbagai indikator perbankan dengan penyaluran kredit. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk risiko kredit dan kondisi perbankan. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada pemahaman perkembangan penyaluran KUR dalam konteks lokal BRI Cabang Tiakur, bukan menguji pengaruh variabel secara statistik.

Oleh karena itu, perkembangan penyaluran KUR di BRI Cabang Tiakur perlu dipahami melalui dua aspek, yaitu perkembangan nominal dan jumlah debitur serta proses yang mendasari penyaluran kredit tersebut. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Maluku Barat Daya, akses terhadap pembiayaan menjadi penting karena modal dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Penyaluran KUR yang berkelanjutan diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Suku Bunga KUR dan Realisasi Penyaluran

Lebih lanjut Data penelitian suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar 6% pada seluruh triwulan tahun 2023, 2024, dan 2025. Meskipun suku bunga yang tercatat tetap, nominal realisasi penyaluran mengalami perubahan. Pada tahun 2023, realisasi tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar Rp2.129.100.000. Pada tahun 2024, realisasi tertinggi juga terjadi pada triwulan II sebesar Rp1.420.300.000, sedangkan pada tahun 2025 realisasi tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar Rp1.170.000.000.

Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori intermediasi keuangan, khususnya dalam memahami bahwa penyaluran kredit tidak hanya ditentukan oleh biaya pinjaman, tetapi juga oleh proses penilaian kelayakan dan karakteristik calon debitur. Suku bunga merupakan salah satu pertimbangan dalam keputusan pembiayaan karena berkaitan dengan besarnya kewajiban pembayaran kredit. Namun, keputusan mengajukan dan menyetujui kredit juga berkaitan dengan kebutuhan modal, prospek usaha, arus kas, serta kemampuan calon debitur memenuhi persyaratan.

Temuan ini relevan dengan penelitian Biasmara (2022), yang dalam proposal terdahulu dirangkum menemukan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Sebaliknya, Haryanto & Dewi (2019) dilaporkan menemukan adanya pengaruh signifikan suku bunga terhadap penyaluran kredit UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara suku bunga dan penyaluran kredit dapat berbeda menurut objek, kondisi, dan karakteristik penelitian.

Dalam penelitian di BRI Cabang Tiakur, suku bunga yang tercatat tetap tidak disertai realisasi penyaluran yang stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa suku bunga saja tidak cukup untuk menggambarkan perkembangan penyaluran KUR. Penafsiran yang lebih menyeluruh perlu memperhatikan proses pengajuan, kelayakan calon debitur, serta kondisi usaha UMKM. Dengan demikian, suku bunga diposisikan sebagai salah satu aspek dalam proses penyaluran, bukan sebagai satu-satunya penentu perubahan realisasi kredit.

Jumlah Debitur dan Akses UMKM terhadap pembiayaan

Berkaitan dengan jumlah debitur KUR pada hasil penelitian menunjukkan perubahan yakni pada tahun 2023, jumlah debitur meningkat dari 14 orang pada triwulan I menjadi 52 orang pada triwulan II, kemudian turun menjadi 33 orang pada triwulan III dan meningkat menjadi 44 orang pada triwulan IV. Pada tahun 2024, jumlah debitur tertinggi tercatat sebanyak 38 orang pada triwulan II, kemudian turun menjadi 8 orang pada triwulan IV. Pada tahun 2025, jumlah debitur meningkat menjadi 33 orang pada triwulan IV setelah berada pada kisaran 21–23 orang pada tiga triwulan sebelumnya.

Perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, khususnya UMKM. Dari perspektif intermediasi keuangan, jumlah debitur merupakan salah satu gambaran mengenai jangkauan penyaluran kredit. Semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh pembiayaan, semakin luas pula jangkauan kredit pada periode tersebut. Namun, jumlah debitur perlu dibaca bersama nominal realisasi karena jumlah penerima yang tinggi tidak selalu menghasilkan nominal kredit yang lebih besar.

Data tahun 2024 memperlihatkan kondisi tersebut dengan jelas. Pada triwulan IV, jumlah debitur hanya tercatat sebanyak 8 orang dan realisasi penyaluran sebesar Rp275.200.000, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah debitur meningkat menjadi 33 orang pada triwulan IV, sedangkan realisasi penyaluran tercatat sebesar Rp977.500.000. Perbedaan ini menggambarkan bahwa perkembangan jumlah debitur dan nominal penyaluran perlu dianalisis secara bersamaan untuk memahami jangkauan dan skala pembiayaan KUR.

Pembahasan ini juga berkaitan dengan Mankiw (2021), yang dalam kerangka teori ekonomi menjelaskan hubungan aktivitas ekonomi dengan kebutuhan pembiayaan dan keputusan ekonomi. Kegiatan usaha yang berkembang dapat meningkatkan kebutuhan modal, tetapi kebutuhan tersebut tidak otomatis menghasilkan penyaluran kredit apabila calon debitur belum memenuhi persyaratan atau belum dinilai layak oleh bank. Dengan demikian, akses UMKM terhadap KUR dipengaruhi oleh kebutuhan pembiayaan sekaligus kemampuan memenuhi proses penilaian kredit.

Dalam konteks BRI Cabang Tiakur, perubahan jumlah debitur menjadi gambaran penting untuk menilai perkembangan akses pembiayaan UMKM. Analisis lebih lanjut mengenai proses pengajuan dan persetujuan kredit dapat menjelaskan bagaimana program KUR menjangkau pelaku usaha serta bagaimana bank menyeimbangkan perluasan akses pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.

Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Risiko Penyaluran KUR

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai nominal kredit bermasalah mengalami perubahan antartiwulan dan antartahun. Pada tahun 2023, nilai tertinggi yang tercatat terjadi pada triwulan IV sebesar Rp154.230.836. Pada tahun 2024, nilai tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar Rp704.448.583. Sementara itu, pada tahun 2025, nilai tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar Rp138.435.468.

Temuan ini dapat dianalisis berdasarkan teori intermediasi keuangan dan konsep pemantauan kredit yang dikemukakan Diamond (1984). Dalam penyaluran kredit, bank menghadapi perbedaan informasi mengenai kondisi dan kemampuan debitur. Oleh sebab itu, proses analisis kelayakan sebelum kredit diberikan serta pemantauan setelah pencairan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kredit. Bank tidak hanya perlu memperluas penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan kredit diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan membayar dan digunakan untuk tujuan produktif.

Penelitian terdahulu oleh Ramandhana et al. (2018) dan Arin (2022), sebagaimana dirangkum dalam proposal, turut menempatkan risiko kredit sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan penyaluran kredit. Arin (2022), misalnya, dilaporkan menemukan bahwa NPL bersama sejumlah indikator perbankan lainnya berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Temuan tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa peningkatan risiko kredit dapat memengaruhi kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung dianggap membuktikan hubungan yang sama di BRI Cabang Tiakur karena objek dan metode penelitiannya berbeda.

Dalam penelitian ini, nilai nominal kredit bermasalah menunjukkan perlunya perhatian terhadap kualitas penyaluran KUR. Nilai nominal tersebut berbeda dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang memerlukan pembanding berupa total kredit sesuai dasar perhitungan yang digunakan. Secara substantif, pengelolaan kredit bermasalah berkaitan dengan kemampuan bank mengidentifikasi masalah pembayaran, memantau kondisi usaha debitur, dan mengambil langkah penanganan yang sesuai. Apabila pengelolaan risiko berjalan baik, bank dapat menjaga keberlanjutan penyaluran kredit sekaligus meminimalkan potensi kerugian. Dengan demikian, kualitas kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program KUR, selain pencapaian nominal penyaluran dan jumlah penerima pembiayaan.

Rasio Kecukupan Modal dan Kehati-hatian Perbankan

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal sebesar 100% pada seluruh triwulan selama tahun 2023–2025. Secara konseptual, kecukupan modal berkaitan

dengan kemampuan bank menyediakan modal untuk menanggung risiko dari kegiatan usahanya. Dalam analisis penyaluran kredit, kecukupan modal merupakan salah satu aspek kondisi internal perbankan yang dapat berkaitan dengan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Pembahasan ini sejalan dengan penelitian Ramandhana et al. (2018) dan Arin (2022), yang dalam proposal terdahulu membahas keterkaitan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan penyaluran kredit. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator permodalan merupakan salah satu variabel yang relevan dalam kajian penyaluran kredit, meskipun hasil dan arah hubungannya dapat berbeda menurut objek penelitian dan model analisis yang digunakan.

Dalam konteks penelitian BRI Cabang Tiakur, angka rasio yang tercantum tidak berubah selama periode pengamatan, sementara realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, angka dalam tabel tidak menunjukkan variasi yang dapat menjelaskan perubahan realisasi penyaluran dari satu triwulan ke triwulan lainnya. Pembahasan rasio kecukupan modal dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan sebagai informasi pendukung mengenai kondisi permodalan yang tercatat dalam dokumen, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa modal menyebabkan kenaikan atau penurunan penyaluran KUR. Secara teori, keputusan penyaluran kredit merupakan hasil pertimbangan berbagai aspek, termasuk kapasitas bank, kelayakan calon debitur, kebutuhan pembiayaan, dan risiko kredit. Dengan demikian, pembahasan permodalan perlu ditempatkan bersama aspek-aspek lain tersebut agar penyaluran KUR dipahami sebagai proses intermediasi yang mempertimbangkan perluasan akses pembiayaan sekaligus keberlanjutan usaha bank.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil deskriptif penyaluran KUR BRI Cabang Tiakur selama tahun 2023–2025 memperlihatkan bahwa realisasi kredit, jumlah debitur, dan kredit bermasalah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pola ini relevan dengan penelitian terdahulu yang mengkaji penyaluran kredit berdasarkan faktor suku bunga, kondisi ekonomi, risiko kredit, dan kecukupan modal. Namun, penelitian terdahulu yang dirangkum dalam proposal memperlihatkan hasil yang beragam.

Biasmara (2022) dilaporkan menemukan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sedangkan Haryanto & Dewi (2019) menemukan pengaruh signifikan. Permana 7 Dillak (2019) dilaporkan menemukan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh *Return on Assets* (ROA), inflasi, dan suku bunga, sedangkan *Non-Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh. Sementara itu, Arin (2022) menemukan pengaruh negatif signifikan dari NPL, *Loan to Deposit Ratio*

(LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ROA, dan pandemi COVID-19 terhadap penyaluran KUR. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit dapat dipengaruhi oleh kombinasi kondisi ekonomi dan kondisi internal bank, serta hasil penelitian bergantung pada objek, periode, dan metode analisis.

Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda karena berfokus pada studi kasus di BRI Cabang Tiakur. Data memperlihatkan perkembangan realisasi penyaluran dan jumlah debitur yang tidak selalu bergerak dalam pola yang sama. Suku bunga yang tercatat tetap sebesar 6% juga tidak diikuti oleh realisasi penyaluran yang tetap. Sementara itu, nominal kredit bermasalah berubah cukup besar selama periode pengamatan. Temuan deskriptif tersebut memperlihatkan pentingnya memahami proses penyaluran kredit dan pengelolaan risiko dalam konteks lokal, bukan hanya melihat hubungan antarvariabel secara terpisah.

Dengan menggunakan teori intermediasi keuangan, perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penilaian kelayakan debitur, dan pemantauan risiko kredit. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa keberhasilan KUR tidak cukup dinilai dari besarnya realisasi penyaluran saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan jangkauan debitur dan kualitas kredit yang disalurkan. Kontribusi utama studi kasus ini terletak pada pemahaman mengenai perkembangan penyaluran KUR dalam konteks BRI Cabang Tiakur dan karakteristik UMKM di Kabupaten Maluku Barat Daya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM di BRI Cabang Tiakur selama tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa realisasi penyaluran KUR mengalami fluktuasi dan menunjukkan kecenderungan menurun berdasarkan penjumlahan angka triwulanan yang tercantum dalam tabel. Realisasi penyaluran tercatat sebesar Rp5.700.300.000 pada tahun 2023, Rp3.963.700.000 pada tahun 2024, dan Rp3.326.600.000 pada tahun 2025. Jumlah debitur juga mengalami perubahan pada setiap triwulan, sedangkan suku bunga KUR tercatat tetap sebesar 6% selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penyaluran KUR tidak hanya dapat dilihat dari suku bunga, tetapi juga perlu dipahami melalui jumlah penerima pembiayaan, kebutuhan modal UMKM, dan proses penyaluran kredit.

Selain itu, nilai nominal kredit bermasalah mengalami perubahan selama tahun 2023–2025, dengan nilai tertinggi yang tercatat sebesar Rp704.448.583 pada triwulan II tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, pemantauan

kemampuan pembayaran debitur, dan pengelolaan risiko kredit dalam menjaga keberlanjutan penyaluran KUR. Secara keseluruhan, keberhasilan penyaluran KUR di BRI Cabang Tiakur perlu dinilai tidak hanya berdasarkan nominal kredit yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan jangkauan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kualitas kredit. Upaya evaluasi penyaluran serta pengelolaan kredit bermasalah menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan UMKM di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Saran yang dapat diberikan Bagi BRI Cabang Tiakur, evaluasi penyaluran KUR perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pencapaian target, perkembangan jumlah debitur, realisasi pencairan, dan kualitas kredit. Bank juga perlu mengidentifikasi kendala yang dihadapi calon debitur dalam proses pengajuan serta memperkuat pemantauan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dapat berjalan seimbang dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko kredit. Bagi pelaku UMKM, pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu disertai perencanaan penggunaan dana, pencatatan keuangan usaha, dan pengelolaan arus kas yang baik. Kemampuan mengelola keuangan dapat membantu pelaku UMKM menggunakan kredit secara produktif serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Serta bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan menjadi penelitian kuantitatif berkaitan dengan penyaluran KUR pada UMKM di Kabupaten Maluku Barat Daya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih, kepada Pimpinan dan Staf BRI Cabang Tiakur, yang telah membantu peneliti terkait dengan penyediaan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Akmal, M. R., Pribadi, M. I., & Anshari, R. (2025). Pengaruh ukuran perusahaan dan risiko kredit terhadap stabilitas keuangan bank di Indonesia periode 2019–2023. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 5*(2). https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.2570

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).* American Psychological Association.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya. (2025). *Kabupaten Maluku Barat Daya dalam angka 2025.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahri, S. Y., & Riyadi, S. (2026). Stabilitas dan risiko bank: Dampak Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Loan terhadap profitabilitas melalui Loan to Deposit Ratio. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, 6*(1). https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6544

Bank Rakyat Indonesia. (2025). *Laporan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024.* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Creswell, J. W., & Poth, C. N.. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.).* SAGE Publications.

Diamond, D. W.. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The Review of Economic Studies, 51(3), 393–414.* https://doi.org/10.2307/2297430

Gurley, J. G., & Shaw, E. S.. (1960). *Money in a theory of finance.* Brookings Institution.

Ismail. (2018). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi.* Kencana.

Kasmir. (2023). *Bank dan lembaga keuangan lainnya (edisi revisi).* PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tahun 2023.* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.).* SAGE Publications.

Oktavianti, M., & Abrianto, H.. (2023). Pengaruh NPL dan CAR terhadap jumlah penyaluran kredit UMKM pada Bank BNI selama masa pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen, 3.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik perbankan Indonesia.* Otoritas Jasa Keuangan.

Puspita, N. V., & Santoso, A.. (2017). Pengaruh spread suku bunga, CAR, dan NPL terhadap penyaluran kredit UKM Kota Kediri (studi pada perbankan Kota Kediri). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2(1).* https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.18

Putri, M. S., Christono, A. B., Rasyid, E., & Suriansha, R.. (2026). Pengaruh suku bunga kredit dan pertumbuhan ekonomi terhadap volume penyaluran kredit UMKM Bank BRI di Indonesia periode 2016–2024. *Journal of Economics and Business UBS, 15(2), 420–427.* https://doi.org/10.52644/g8q3jm85

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* Republik Indonesia.

Saba, R. S., Fanggidae, A. H. J., & Muga, M. P. L. (2025). Analisis prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat dan penanganan kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Diponegoro Soe. *Jurnal Riset Akuntansi, 3*(1). https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2972

Solehah, U., Lina, E. V., Cahyani, S., & Sari, O. (2025). Analisis manajemen risiko tingkat suku bunga pada UMKM pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR): (Studi pada Depot Air Minum Kari Water Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru). *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 3*(3). https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i3.1742

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sukirno, S.. (2019). *Makroekonomi: Teori pengantar (edisi ketiga).* PT RajaGrafindo Persada.

Tambunan, T. T. H.. (2020). *UMKM di Indonesia.* Prenada Media.

Todaro, M. P., & Smith, S. C.. (2021). *Economic development (13th ed.).* Pearson.

Tukan, M. M., Lamawitak, P. L., & Dince, M. N. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Koperasi Obor Mas Kantor Cabang Utama Sikka. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *2*(1). https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.584

Yin, R. K.. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.).* SAGE Publications.